

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019)**

***THE INFLUENCE OF REGIONAL ORIGINAL REVENUE, GENERAL ALLOCATION
FUNDS, AND SPECIAL ALLOCATION FUNDS FOR CAPITAL EXPENDITURE
(Study on Central Java Province period 2015-2019)***

Deddy Prasetyo¹, Deannes Isyunawardhana²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

deddyprasetyo@student.telkomuniversity.ac.id¹, deannes@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2005 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan serta pengaruh secara simultan dan secara parsial Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal. Metode yang dipilih adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teknik sampling *nonprobability sampling* dengan metode *sampling* total sehingga sampel penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. Secara parsial variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja modal

Abstract

Based on Law no. 24 of 2005 Capital Expenditures are budget expenditures for the acquisition of fixed assets and other assets that provide benefits for more than one accounting period. Capital expenditure is an important factor in improving the economy. This study aims to determine the development and influence simultaneously and partially Original Regional, General Allocation Funds, Special Allocation Funds on capital expenditures. The method chosen is quantitative research. The population of this research is Regency/City in Central Java Province in 2015-2019. This study uses a non-probability sampling technique with a total sampling method so that the sample of this study is Regency/City in Central Java Province in 2015-2019. The analytical technique used in this research is panel data regression analysis. The results of this study indicate that the variables of local revenue, general allocation funds, and special allocation funds have a simultaneous effect on capital expenditures. Partially, the variables of local revenue, general allocation funds, and special allocation funds have a significant positive effect on capital expenditures.

Keywords: *Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), capital expenditure*

1. Pendahuluan

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yang mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah membuat pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengatur keuangannya sendiri serta membuat berbagai kebijakan yang dapat membuat daerahnya semakin maju [1]. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggunakan anggaran yang bersumber dari pendapatan daerah tersebut. Penggunaan anggaran tersebut dapat berupa alokasi anggaran untuk belanja daerah, pembangunan sarana dan prasarana publik. Dalam menentukan alokasi anggaran untuk belanja tentunya harus berpedoman pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun, masih terdapat daerah yang mengalokasikan dana APBD untuk alokasi belanja pegawai dalam jumlah yang terlalu besar. Padahal seharusnya pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBDnya untuk belanja modal yang dinilai lebih bermanfaat bagi

pemenuhan pelayanan publik [2]. Permasalahan yang dihadapi pemerintah adalah dana pemerintah pusat yang disalurkan ke daerah belum sebanding dengan yang diserap pusat dari daerah. Dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan sistem pembiayaan yang adil danimbang, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat tercipta *good governance* [3].

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2005 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Namun, alokasi belanja modal dalam APBD di pemerintah provinsi masih kurang diperhatikan sehingga pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBDnya untuk membiayai belanja modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin lainnya. Adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah berkesempatan untuk mengembangkan potensi daerah. Upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah meningkatkan anggaran belanja modal dimana sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) [4].

Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Ismatullah [5, p. 396] Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli dari suatu daerah. PAD setiap daerah tidak sama karena tergantung pada potensi daerah tersebut dan kemampuan untuk mengelolanya. Permasalahan yang dihadapi daerah yaitu jika tidak maksimal dalam menggali sumber-sumber yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah sehingga PAD tidak banyak berkontribusi terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Pemerintah daerah yang mampu menggali sumber PAD dan memiliki kemampuan dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi keuangan daerah maka dapat meningkatkan nilai PAD [4].

Faktor lain yang berpengaruh terhadap belanja modal adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 1 mendefinisikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah dengan tujuan agar keuangan antar daerah merata sehingga kebutuhan dana daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dapat tercapai. DAU berperan untuk membuat pemerataan jika terjadi *fiscal gap* atau selisih dari potensi fiskal dengan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah [6]. Jika suatu daerah mempunyai keperluan keuangan kecil maka DAU yang diberikan juga kecil, begitu sebaliknya jika suatu daerah mempunyai keperluan keuangan besar maka DAU yang diberikan juga besar [7].

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap belanja modal adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 1 mendefinisikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada suatu daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus urusan pemerintah daerah yang menjadi prioritas nasional. Penggunaan DAK diatur oleh pemerintah pusat yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan dan dilakukan sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan dimana komponen-komponen yang dibiayai adalah termasuk belanja modal. DAU tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas [3].

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan serta mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial dari variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi dan sampel kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi data panel.

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi [8, p. 33]. Pengukuran variabel belanja modal dapat dirumuskan sebagai berikut (Ayem dan Pratama, 2018):

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} \\ + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari daerah itu sendiri yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan [8, p. 31]. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang boleh dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran daerah [9, p. 405]. Pengukuran variabel PAD dapat dirumuskan sebagai berikut [10]:

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

HPS = Hasil Pajak Daerah

RD = Retirbusi Daerah

PLPD = Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah

2.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Pengukuran variabel DAU dapat dirumuskan sebagai berikut [10]:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

2.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah belanja pemerintah daerah yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan berguna untuk menambah aset atau kekayaan daerah. Pengukuran variabel DAK dapat dirumuskan sebagai berikut [10]:

$$\text{Bobot DAK} = \text{Bobot Daerah} + \text{Bobot Teknis}$$

$$\text{Bobot Daerah} = \text{IFW} \times \text{IKK}$$

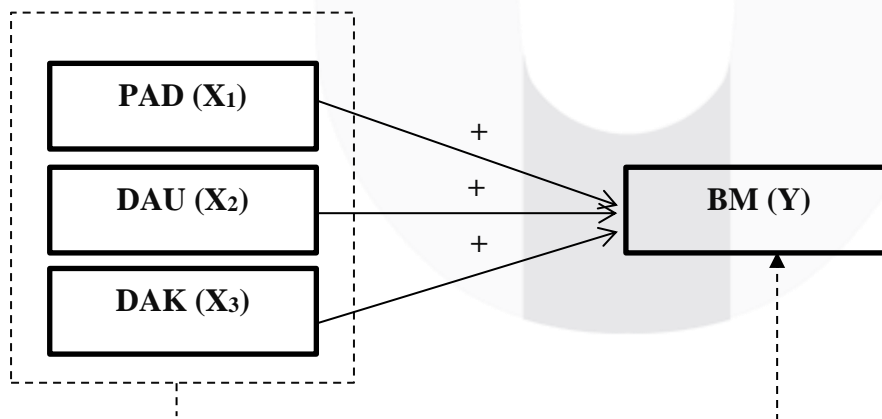
$$\text{Bobot Teknis} = \text{IT} \times \text{IKK}$$

Keterangan:

IFW = Indeks Fiskal dan Wilayah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IT = Indeks Teknis



Keterangan:

—————> Secara parsial

- - - - -> Secara simultan

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang diajukan yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2.5. Metodologi

Metode yang dipilih pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan karakteristik deskriptif dan termasuk pada kategori penelitian studi kasus. Populasi penelitian ini semua adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teknik sampling *nonprobability sampling* yaitu teknik sampling yang tidak akan memberi peluang yang sama bagi semua anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik sampel yang digunakan menggunakan *sampling* total yaitu penentuan sampel penelitian dengan menjadikan seluruh populasi sebagai sampel. Oleh karena itu, sampel penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut:

$$BM = a + b_1PAD + b_2DAU + b_3DAK + e$$

Keterangan:

- BM = Belanja Modal
 a = Konstanta
 b₁₋₃ = Koefisien regresi
 PAD = Pendapatan Asli Daerah
 DAU = Dana Alokasi Umum
 DAK = Dana Alokasi Khusus
 e = Standar error

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Uji Statistik Deskriptif

Berikut ini adalah uji statistik deskriptif dari variabel belanja modal, PAD, DAU, dan DAK Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah mulai dari tahun 2015 sampai 2019.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif (dalam Rupiah)

	Belanja_Modal	PAD	DAU	DAK
Minimum	51.980.727.019	152.044.596.332	400.176.755.000	3.750.100.000
Maksimum	1.275.359.088.966	2.066.333.418.588	1.437.036.239.000	483.813.446.054
Mean	383.486.693.272	359.897.461.610	957.339.441.385	244.452.020.029
Std. Dev.	179.652.541.135	252.662.465.021	244.594.348.835	123.573.169.240
Observations	175	175	175	175

Sumber: Hasil Output Eviews Versi 10 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, nilai minimum belanja modal adalah sebesar 51.980.727.019 yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang tahun 2015. Nilai maksimum belanja modal sebesar 1.275.359.088.966 yang dimiliki oleh Kota Semarang tahun 2017. Nilai rata-rata belanja modal adalah sebesar 383.486.693.272 dan nilai standar deviasi sebesar 179.652.541.135. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, artinya belanja modal tahun 2015 sampai 2019 merupakan data berkelompok atau tidak bervariasi.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai minimum sebesar 152.044.596.332 dimiliki oleh Kota Pekalongan tahun 2015. Nilai maksimum PAD sebesar 2.066.333.418.588 dimiliki oleh Kota Semarang tahun 2019. Nilai rata-rata PAD adalah sebesar 359.897.461.610 dan nilai standar

deviasi sebesar 252.662.465.021. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, artinya PAD tahun 2015 sampai 2019 merupakan data berkelompok atau tidak bervariasi.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai nilai minimum sebesar 400.176.755.000 dimiliki oleh Kota Salatiga tahun 2015. Nilai maksimum DAU sebesar 1.437.036.239.000 dimiliki oleh Kabupaten Banyumas tahun 2019. Nilai rata-rata DAU adalah sebesar 957.339.441.385 dan nilai standar deviasi sebesar 244.594.348.835. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, artinya DAU tahun 2015 sampai 2019 merupakan data berkelompok atau tidak bervariasi.

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai nilai minimum sebesar 3.750.100.000 dimiliki oleh Kota Surakarta tahun 2015. Nilai maksimum DAK sebesar 483.813.446.054 dimiliki oleh Kabupaten Cilacap tahun 2016. Nilai rata-rata DAK adalah sebesar 244.452.020.029 dan nilai standar deviasi sebesar 123.573.169.240. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, artinya DAK tahun 2015 sampai 2019 merupakan data berkelompok atau tidak bervariasi.

3.2. Uji Asumsi Klasik

3.2.1. Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
PAD	0.001187	3.742767	1.230917
DAU	0.002158	34.40860	2.097146
DAK	0.007258	8.886099	1.800354

Sumber: Hasil Output Eviews Versi 10 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2 dari hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai centered VIF masing-masing variabel bebas kurang dari 10 ($VIF < 10$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terbukti tidak terdapat masalah multikolinieritas.

3.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	0.040243	0.020750	1.939420	0.0541
DAU	0.043214	0.027978	1.544560	0.1243
DAK	0.043639	0.051310	0.850497	0.3962

Sumber: Hasil Output Eviews Versi 10 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3 dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser diperoleh nilai signifikansi masing-masing variabel bebas lebih dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model.

3.3. Analisis Regresi Data Panel

3.3.1. Pemilihan Model Data Panel

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel maka akan dilakukan pengujian model sebagai berikut:

1. Uji Signifikansi *Common Effect* atau *Fixed Effect* (Uji Chow)

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: MODEL_FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.205875	(34,137)	0.0000
Cross-section Chi-square	125.091361	34	0.0000

Sumber: Hasil Output Eviews Versi 10 (data diolah)

Hasil analisis dari Uji Chow pada Tabel 4 menunjukkan nilai probabilitas pada *Cross-section F* sebesar 0,0000 artinya nilai tersebut kurang dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Berdasarkan hasil tersebut maka selanjutnya dilakukan Uji Hausman.

2. Uji Signifikansi *Fixed Effect* atau *Random Effect* (Uji Hausman)**Tabel 5. Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: MODEL_REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.064515	3	0.3818

Sumber: Hasil Output Eviews Versi 10 (data diolah)

Hasil analisis dari Uji Hausman pada Tabel 5 menunjukkan nilai probabilitas pada *Cross-section random* sebesar 0,3818 artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga yang terpilih adalah *Random Effect Model*. Jika menggunakan Eviews versi 10 dan model yang terpilih adalah *Random Effect Model* maka Uji *Lagrange Multiplier* tidak perlu dilakukan sehingga model yang terpilih adalah *Random Effect Model*.

3.3.2 Persamaan Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pengujian model maka model terpilih yang paling tepat digunakan pada penelitian ini merupakan *Random Effect Model*. Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh pengujian menggunakan *Random Effect Model* yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Uji *Random Effect Model*

Dependent Variable: BELANJA_MODAL
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/29/21 Time: 09:41
Sample: 2015 2019
Periods included: 5
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 175
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.89E+09	5.12E+10	0.075826	0.9396
PAD	0.433462	0.049191	8.811817	0.0000
DAU	0.191538	0.063517	3.015551	0.0030
DAK	0.164586	0.073230	2.247511	0.0259
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			6.68E+10	0.4055
Idiosyncratic random			8.09E+10	0.5945
Weighted Statistics				
R-squared	0.503203	Mean dependent var		1.83E+11
Adjusted R-squared	0.494487	S.D. dependent var		1.14E+11
S.E. of regression	8.09E+10	Sum squared resid		1.12E+24
F-statistic	57.73499	Durbin-Watson stat		1.508715
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.672184	Mean dependent var		3.83E+11
Sum squared resid	1.84E+24	Durbin-Watson stat		0.917040

Sumber: Hasil Output Eviews Versi 10 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 6 maka diperoleh persamaan model regresi data panel yang menjelaskan pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. Model persamaan regresi tersebut yaitu:

$$BM = 3.885.086.608,44036 + 0,433462PAD + 0,191538DAU + 0,164586DAK + e$$

Dimana:

- BM = Belanja Modal
 PAD = Pendapatan Asli Daerah
 DAU = Dana Alokasi Umum
 DAK = Dana Alokasi Khusus

Pada persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 3.885.086.608,44036 menunjukkan bahwa jika variabel PAD, DAU, dan DAK bernilai tetap, maka belanja modal pada Kabupaten/ Kota Provinsi di Jawa Tengah sebesar 3.885.086.608,44036 satuan.
2. Koefisien regresi PAD sebesar 0,433462 menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan PAD sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,433462. Hal ini menunjukkan bahwa ketika PAD meningkat maka belanja modal juga meningkat.
3. Koefisien regresi DAU sebesar 0,191538 menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan DAU sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,191538. Hal ini menunjukkan bahwa ketika DAU meningkat maka belanja modal juga meningkat.
4. Koefisien regresi DAK sebesar 0,164586 menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan DAK sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,164586. Hal ini menunjukkan bahwa ketika DAK meningkat maka belanja modal juga meningkat.

3.3.3 Analisis Koefisien Determinasi

Pengukuran koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam menerangkan variasi dari masing-masing variabel independen. Berdasarkan Tabel 6 maka dapat diketahui nilai *adjusted R-square* model penelitian ini adalah sebesar 0,494487 atau 49,4487%. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DAU, dan DAK mempengaruhi variabel dependen yaitu belanja modal sebesar 49,4487%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 50,5513% dipengaruhi variabel lain.

3.3.4 Pengujian Hipotesis

3.3.4.1 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, uji F disebut juga sebagai uji secara simultan. Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Prob (F-statistic) adalah 0,000000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka H₀ ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

3.3.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pada penelitian ini uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel PAD, DAU, dan DAK secara parsial terhadap belanja modal. Kriteria pengambilan keputusan uji parsial yaitu jika nilai probabilitas < 0,05 maka H₀ ditolak artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial. Namun, jika nilai probabilitas > 0,05 maka H₀ diterima artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 6 maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai probabilitas PAD sebesar 0,0000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 0,0000 < 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,433462 dan nilai t hitung sebesar 8,811817 maka H₀ ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap belanja modal.
2. Nilai probabilitas DAU sebesar 0,0030. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 0,0030 < 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,191538 dan nilai t hitung sebesar 3,015551 maka H₀ ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap belanja modal.

3. Nilai probabilitas DAK sebesar 0,0259. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,0259 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,164586 dan nilai t hitung sebesar 2,247511 maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa DAK secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap belanja modal.

3.4. Pembahasan Hasil Penelitian

3.4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Prob (F-statistic) adalah 0,000000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. Nilai koefisien determinasi berdasarkan nilai dari *adjusted R-square* adalah sebesar 0,494487 atau 49,4487%. Maka dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, dan DAK mampu menjelaskan belanja modal pemerintah daerah pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 49,4487% dan 50,5513% sisanya dipengaruhi oleh faktor atau variabel yang lain atau variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

3.4.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil dari uji t secara parsial pada Tabel 6 maka dapat dibuktikan bahwa nilai probabilitas dari PAD sebesar 0,0000. Nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya nilai PAD mempengaruhi variasi nilai dari belanja modal. Nilai koefisien regresi sebesar 0,433462 menunjukkan adanya hubungan dengan arah positif antara PAD dengan belanja modal, artinya setiap bertambahnya satu satuan pada PAD maka akan bertambah pula nilai belanja modal. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 20014, PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah. Adapun PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta pendapatan lainnya yang sah. Semakin tinggi PAD yang diterima maka pemerintah daerah dapat semakin maksimal dalam melaksanakan pembangunan di daerah tersebut. Dengan lengkapnya fasilitas yang tersedia maka akan meningkatkan *public service* sehingga pendapatan asli daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Semakin tingginya pendapatan asli daerah juga akan semakin tinggi kebutuhan belanja modalnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan arah positif, dimana jika PAD meningkat maka belanja modal daerah tersebut juga akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dimana dalam penelitian sebelumnya [11] menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

3.4.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil dari uji t secara parsial pada Tabel 6 maka dapat dibuktikan bahwa nilai probabilitas dari DAU sebesar 0,0030. Nilai probabilitas $0,0030 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya nilai DAU mempengaruhi variasi nilai dari belanja modal. Nilai koefisien regresi sebesar 0,191538 menunjukkan adanya hubungan dengan arah positif antara DAU dengan belanja modal, artinya setiap bertambahnya satu satuan pada DAU maka akan bertambah pula nilai belanja modal. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/ kota dengan tujuan sebagai pemerataan keuangan antar daerah dalam mendanai kebutuhan daerah. Semakin tinggi DAU maka daerah tersebut dapat semakin meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas daerah yang dapat menunjang pelayanan umum. Semakin tinggi kebutuhan DAU maka belanja modal juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi dana alokasi umum, maka pemerintah daerah semakin memaksimalkan pembangunan sehingga belanja modal daerah tersebut juga akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dimana dalam penelitian sebelumnya [11] menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

3.4.4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil dari uji t secara parsial pada Tabel 6 maka dapat dibuktikan bahwa nilai probabilitas dari DAK sebesar 0,0259. Nilai probabilitas $0,0259 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya nilai DAK mempengaruhi variasi nilai dari belanja modal. Nilai koefisien regresi sebesar 0,164586 menunjukkan adanya hubungan dengan arah positif antara DAK dengan belanja modal, artinya setiap

bertambahnya satu satuan pada DAK maka akan bertambah pula nilai belanja modal. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Semakin tinggi DAK yang diperoleh pemerintah daerah dari APBN maka pemerintah daerah tersebut dapat mengalokasikan pemanfaatan DAK untuk mendanai kebutuhan fisik agar sarana dan prasarana daerah semakin terpenuhi sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga akan semakin berkembang. Semakin besar DAK menunjukkan bahwa belanja modal daerah tersebut juga semakin tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dimana dalam penelitian sebelumnya [2] menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan lima tahun yang terdiri dari 175 unit sampel dari 35 kabupaten/ kota. Hasil analisis data yang telah dilakukan menggunakan Eviews 10, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai rata-rata sebesar 359.897.461.610 dan nilai standar deviasi sebesar 252.662.465.021. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, artinya PAD tahun 2015 sampai 2019 merupakan data berkelompok atau tidak bervariasi.
- b. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai rata-rata sebesar 957.339.441.385 dan nilai standar deviasi sebesar 244.594.348.835. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, artinya DAU tahun 2015 sampai 2019 merupakan data berkelompok atau tidak bervariasi.
- c. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai nilai rata-rata sebesar 244.452.020.029 dan nilai standar deviasi sebesar 123.573.169.240. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, artinya DAK tahun 2015 sampai 2019 merupakan data berkelompok atau tidak bervariasi.
- d. Variabel belanja modal memiliki nilai rata-rata sebesar 383.486.693.272 dan nilai standar deviasi sebesar 179.652.541.135. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, artinya belanja modal tahun 2015 sampai 2019 merupakan data berkelompok atau tidak bervariasi.

2. Berdasarkan hasil pengujian simultan, variabel independen pada penelitian ini yang terdiri dari PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019.
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan:
 - a. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019.
 - b. Variabel dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019.
 - c. Variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019.

4.2. **Saran**

4.2.1. **Aspek Teoritis**

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai pengembangan bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode pengamatan sehingga hasil penelitian yang diperoleh diharapkan akan lebih terperinci.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pengukuran variabel dependen lainnya misalnya belanja daerah atau belanja pegawai.

4.2.2. **Aspek Praktisi**

Bagi pemerintah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah tersebut. Selain itu juga pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tepat pada sarannya sehingga dapat memaksimalkan pembangunan yang dapat meningkatkan dan memperbaiki fasilitas serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh daerah tersebut.

REFERENSI

- [1] Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169–182. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i2.2987>
- [2] Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi*, 14(1), 44. <https://doi.org/10.29264/jinv.v0i0.3546>
- [3] Ismatullah, D. (2019). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. CV. Pustaka Setia.
- [4] Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i03.p05>
- [5] Kristanti, I. N. (2021). *Anteseden Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah*. 9(1), 27–35. <http://e-journal.polsa.ac.id/index.php/jneti/article/view/160/104>
- [6] Nurchayati, & Susiani. (2021). Belanja Modal APBD Kabupaten-Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018. *Serat Acitya*, 2(1), 44–54.
- [7] Pradana, Y. E., & Handayani, N. (2017). PENGARUH PAD , DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6, 14.
- [8] Ratmono, Dwi dan Sholihin, M. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. UPP STIM YKPN.
- [9] Rifai, R. A. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *E-Journal Katalogis*, 5(7), 169–180.
- [10] Rosidin, U. (2019). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. CV. Pustaka Setia.
- [11] Widiasih, N. N., & Gayatri. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2143–2171